

Evaluasi Program Pelatihan Digital Entrepreneurship Academy (DEA) Untuk UMKM di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo) Surabaya

Dina Irsalina Zarfa¹⁾, Aris Sunarya²⁾

¹⁾²⁾Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: dinazarva12@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi digital telah menjadi kebutuhan mendesak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia untuk meningkatkan daya saing dalam era ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program DEA di BPSDMP Kominfo Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Evaluasi yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup enam indikator utama: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Fokus penelitian pada penelitian ini meliputi enam indikator yang digunakan untuk mengevaluasi program pelatihan DEA yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Program DEA terbukti dalam meningkatkan keterampilan digital UMKM dengan jumlah peserta yang seringkali melebihi target, sementara dari segi efisiensi pelatihan daring mampu menjangkau lebih banyak peserta. Pelatihan ini cukup menjadi solusi bagi permasalahan UMKM di bidang marketing digital dan peserta secara merata mendapatkan bantuan apabila memiliki kendala dengan respon tim pelaksana yang sigap. Selain itu, pelatihan ini sangat tepat karena selalu memperbarui materi yang relevan dari tahun ke tahun. Serta adanya faktor pendukung program ini yaitu meningkatkan literasi peserta dan tim pelaksana yang tanggap dalam kelancaran pelaksanaan, kemudian faktor penghambat yang terjadi dalam pelatihan DEA yakni peserta yang memiliki ketidakesetaraan teknologi dan jaringan, literasi digitalisasi yang rendah, serta meyakinkan peserta. Saran dalam penelitian ini adalah dengan mengembangkan sistem pelatihan hybrid untuk menjangkau keterbatasan peserta yang memiliki kendala jaringan serta memberikan lebih banyak praktik yang dilakukan.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Digital Entrepreneurship Academy, UMKM, Literasi Digital, Transformasi Digital

Abstract

Digital transformation has become an urgent need for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia to improve competitiveness in the digital economy era. This study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of the DEA program at BPSDMP Kominfo Surabaya. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The research informants consisted of 10 informants, namely the head of BPSDMP Kominfo Surabaya, the DEA training organizing team, instructors, and training participants. The evaluation used for this research uses William N. Dunn's policy evaluation approach which includes six main indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The research focus in this study includes six indicators used to evaluate DEA training programs, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results show that the effectiveness of the DEA Program is proven in improving the digital skills of MSMEs with the number of participants often exceeding the target, while in terms of efficiency, online training is able to reach more participants. The training is a solution to the problems of MSMEs in the field of digital marketing and participants evenly get help if they have problems with the swift response of the implementation team. In addition, this training is very appropriate because it always updates relevant material from year to year. As well as the supporting factors of this program, namely increasing participant literacy and a responsive implementation team

in smooth implementation, then the inhibiting factors that occur in DEA training are participants who have technology and network inequality, low digitalization literacy, and convincing participants. Suggestions in this study are to develop a hybrid training system to reach limited participants who have network constraints and provide more practice conducted.

Keywords: Policy Evaluation, Digital Entrepreneurship Academy, UMKM, Digital Literacy, Digital Transformation.

A. LATAR BELAKANG

Di era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi sedang menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi. Khususnya di bidang kewirausahaan, teknologi digital saat ini sedang banyak digunakan sebagai pendorong perekonomian. Untuk memperbaiki perekonomian dan menjamin kesejahteraan warganya, Indonesia perlu mengurangi jumlah pengangguran, dan kewirausahaan adalah salah satu cara khusus untuk melakukannya. Contohnya seperti membuka usaha UMKM yang menggunakan teknologi digital karena memudahkan penjual untuk mempromosikan barang dagangan di sosial media mereka.

Teknologi digital mencakup teknologi komputer dan elektronik yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan mengirimkan informasi digital. Ini termasuk komputer, perangkat mobile, internet, jaringan komputer, perangkat lunak, dan berbagai teknologi lainnya. Teknologi digital sangat penting dalam banyak hal seperti bisnis, pendidikan, hiburan, kesehatan, transportasi, dan lainnya. Untuk pertumbuhan ekonomi dan menanggulangi pengangguran, teknologi digital sangat penting juga untuk seseorang atau pelaku usaha yang akan membuka usaha UMKM karena dapat meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses, memperluas jangkauan pasar dengan pemasaran online, dan memudahkan interaksi dengan pelanggan.

Menurut Rudjito, UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari

keseluruhan unit usaha. Selain itu, UMKM dapat menggerakkan roda perekonomian Indonesia serta mendistribusikan hasil – hasil pembangunan ekonomi. UMKM salah satu jenis usaha yang tahan terhadap guncangan (shock) dan krisis. Hal ini dibuktikan pada sekitar tahun 1997 hingga 1999 dimana Indonesia mengalami krisis moneter tetapi UMKM justru bertahan dan bahkan tumbuh. Maka dari itu, di era digitalisasi saat ini bahwa UMKM dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan mengintegrasikan strategi digital dalam operasional bisnis mereka agar dapat bertahan dan bersaing secara global. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 65 juta unit.

Menurut Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria UMKM yang baru diatur dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas: pertama, usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak satu miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kedua, usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari satu miliar rupiah sampai dengan paling banyak lima miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha. Ketiga, usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari lima miliar rupiah sampai dengan paling banyak sepuluh miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Untuk mendukung transformasi digital UMKM, pemerintah melalui Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BPSDMP) Kominfo mengadakan program *Digital Entrepreneurship Academy (DEA)* untuk pelaku usaha UMKM dan khususnya BPSDMP Kominfo yang terletak di Surabaya. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika yang disebut BPSDMP Kominfo merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. BPSDMP Kominfo secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan Sumber Daya Manusia. BPSDMP Kominfo mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja. BPSDMP Kominfo memiliki beberapa fungsi, antara lain: yang pertama, pelaksanaan penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran. Tahap kedua, penyiapan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika. Tahap ketiga, penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika. Tahap yang keempat, penyiapan pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika. Tahap yang kelima adalah penyiapan pelaksanaan penjaminan mutu dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika. Tahap yang terakhir tahap keenam adalah pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, evaluasi, laporan, dan kerja sama, serta urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian,

perlengkapan, dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat.

BPSDMP Kominfo memiliki beberapa pelatihan yang diringkas menjadi satu di dalam satu program yang bernama *Digital Talent Scholarship (DTS)*. *Digital Talent Scholarship (DTS)* adalah program pelatihan pengembangan kompetensi yang telah diberikan kepada talenta digital Indonesia sejak tahun 2018. Program *Digital Talent Scholarship* didesain untuk menciptakan ekosistem seimbang dalam memaksimalkan peran pentahelix (pemerintah, komunitas/masyarakat, institusi pendidikan tinggi, dunia usaha, dan media) untuk menjadi fasilitator dan akselerator pendukung ekonomi digital. Di dalam program DTS secara garis besar memiliki delapan akademi, yaitu: *Fresh Graduate Academy (FGA)*, *Vocational School Graduate Academy (VSGA)*, *Thematic Academy (TA)*, *Professional Academy (ProA)*, *Government Transformation Academy (GTA)*, *Digital Entrepreneurship Academy (DEA)*, *Digital Leadership Academy (DLA)*, dan *Talent Scouting Academy (TSA)*. Berdasarkan dari delapan program tersebut, masing – masing memiliki keterkaitan sesuai dengan skema yang ditujukan.

Pelatihan DEA di BPSDMP Kominfo Surabaya mulai berjalan pada tahun 2022. Pelatihan ini dilaksanakan di kantor BPSDMP Kominfo Surabaya secara online. Sebelum melakukan pelatihan, BPSDMP Kominfo menyediakan pendaftaran secara online di web atau aplikasi Digitalent yang digunakan untuk melakukan pendaftaran berbagai macam pelatihan yang ada di dalam aplikasi tersebut. Terutama untuk pelatihan DEA pun juga tersedia. Mereka juga memiliki target pencapaian setiap tahun nya yang dimulai dari tahun 2022 hingga tahun 2024 terakhir sampai pelatihan selesai mencapai target. Pelatihan DEA dilakukan selama 2 hari yang dimulai dari pagi hingga sore hari. Serta yang memiliki empat tema dalam beberapa kali pelatihan yaitu dasar satu, dasar dua, madya satu, dan yang terakhir adalah madya dua. Berikut adalah data

pencapaian target peserta tahun 2022 hingga 2024:

Tabel 1.1 Data Pencapaian Peserta Tahun 2022-2024

Tahun	Target Peserta	Pencapaian	Persentase
2022	2.000	5.315	265,75%
2023	2.000	1.989	99,45%
2024	2.160	2.162	1,0%

Sumber: BPSDMP Kominfo Surabaya

Berdasarkan data diatas, tahun 2022 mempunyai target untuk peserta pelatihan DEA berjumlah 2.000 peserta dan pencapaian melebihi target berjumlah 5.315 peserta dengan persentase sebanyak 265,75%. Sedangkan pada tahun 2023 memiliki target 2.000 peserta dan pencapaian jumlah peserta menurun tidak sampai target menjadi 1.989 peserta dengan persentase sebanyak 99,45%. Pada tahun 2024 pelatihan DEA dilaksanakan kembali dengan target peserta 2.160 peserta, kemudian peserta yang mengikuti pelatihan melebihi target sebanyak 2.162 dengan persentase 1,0%. Maka dari itu pelatihan DEA seringkali mencapai target karena banyaknya pelaku usaha UMKM yang ingin mengembangkan usahanya dengan mempelajari ilmu pengetahuan mengenai UMKM menggunakan teknologi digital.

Maka dari itu berdasarkan penjelasan diatas, peneliti melakukan penelitian dan mengambil judul yaitu “Evaluasi Program Pelatihan Digital Entrepreneurship Academy Untuk UMKM Di BPSDMP Kominfo Surabaya”

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara sederhana dapat definisikan sebagai segala sesuatu yang menurut pemerintah harus atau tidak boleh dilakukan. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk ekspresi Tindakan pemerintah terhadap sesuatu, dan bukan sekedar ekspresi keinginan pemerintah atau pejabat publik. Keputusan suatu pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan bagian dari kebijakan publik. Sebab keputusan itu

mempunyai dampak atau akibat yang sama dengan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Kebijakan publik adalah rancangan yang dilembagakan untuk memecahkan masalah yang relevan di dunia nyata, dipandu oleh konsepsi dan diimplementasikan oleh program sebagai rangkaian tindakan yang dibuat dan ditetapkan, khususnya oleh pemerintah dalam menanggapi masalah sosial. Kebijakan publik telah dikonseptualisasikan dalam berbagai cara.

Secara umum, kebijakan atau policy adalah hal yang digunakan untuk menunjukkan sebuah perilaku seseorang. Kebijakan adalah suatu petunjuk dan batasan yang dilakukan secara umum. Batasan yang menjadi arah dari sebuah tindakan yang harus dilakukan. Serta sebuah aturan yang harus diikuti oleh para pelaku. Juga pelaksana kebijakan, karena sangat penting untuk pengolahan di dalam sebuah organisasi. Serta pengambilan keputusan dari sebuah perencanaan yang sudah dibuat dan disepakati secara bersama. Maka dari itu, kebijakan menjadi sebuah sarana pemecah masalah atas berbagai tindakan yang terjadi.

William N. Dunn menguraikan bahwa dalam konteks kebijakan publik, terdapat berbagai alternatif saling berhubungan yang dipilih oleh para pemangku kepentingan atau pejabat pemerintah dalam hal – hal yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintahan, seperti menjaga keamanan, mengatur energi, meningkatkan kesejahteraan, mengelola Pendidikan, memberikan instruksi, memberikan bantuan pemerintah, menangani kriminalitas, mengelola perkotaan, dan sebagainya. (Seanbau et al., 2024)

Menurut Abdul Wahab (2005), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Menurut Thomas R Dye (1998) kebijakan publik adalah “is whatever government choose to do or not to do” atau yang berarti “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Pengertian tersebut menekankan bahwa kebijakan publik bukanlah pernyataan sebuah keinginan dari pejabat atau pemerintah semata.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai – nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat.

2. Proses Kebijakan Publik

- 1) Penyusunan Agenda: Sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.
- 2) Formulasi Kebijakan: Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah – masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing – masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
- 3) Adopsi Kebijakan: Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan

legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah dan mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi – cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota menoleransi pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol – simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

- 4) Implementasi Kebijakan: Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan – catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan – badan pemerintah di tingkat bawah. Berbagai kepentingan akan bersaing satu sama lain sepanjang tahap implementasi ini. Para pelaksana kebijakan mungkin mendukung penerapan kebijakan tertentu namun menentang penerapan kebijakan lainnya.
- 5) Evaluasi Kebijakan: Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi dipandang sebagai suatu fungsional. Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah – masalah kebijakan, program – program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

3. Tipe – Tipe Kebijakan

- 1) Masalah Kebijakan: Adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai kondisi – kondisi yang mendahului adanya problem maupun informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntur pemecahan masalah.
- 2) Alternative Kebijakan: arah tindakan secara potensial tersedia yang dapat memberi sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.
- 3) Tindakan Kebijakan : Adalah suatu Gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.
- 4) Hasil Kebijakan: Adalah akibat – akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.
- 5) Hasil Guna Kebijakan: Adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberikana sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataannya jarang ada problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu masalah dapat menumbuhkan masalah sehingga perlu pemecahan Kembali atau perumusan kembali.

4. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai

serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008: 166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. (Kebijakan, 2008)

Menurut Brian & White (dalam Samodra Wibawa, 1994:36) evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauh mana kebijakan publik dan implementasinya mendekati tujuan. Pengertian evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Brian & White di atas, mengarahkan penilaian evaluasi kebijakan dapat dilakukan pada tahap implementasi dan dapat dinilai sejauh mana dampak dan konsekuensi – konsekuensi yang dihasilkan. (Ii & Teori, 1994).

Berdasarkan definisi di atas, evaluasi dianggap sebagai kegiatan fungsional. Evaluasi kebijakan dapat dilakukan sepanjang seluruh proses kebijakan. Ini dapat mencakup tahap implementasi, tahap dampak kebijakan, tahap perumusan masalah atau masalah kebijakan, tahap program atau program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan.

5. Jenis Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Pemilihan jenis evaluasi yang paling tepat juga bergantung dengan apa yang akan dievaluasi, tujuan evaluasi, dan sumber daya yang tersedia. Berikut adalah jenis evaluasi kebijakan secara umum:

1) Evaluasi Formatif

Proses pengumpulan dan menganalisis umpan balik selama pengembangan atau implementasi suatu program, proyek, atau produk. Proses ini mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area yang perlu ditingkatkan dengan tujuan melakukan

penyesuaian guna meningkatkan kualitas dan efektivitas program atau produk.

2) Evaluasi Sumatif

Suatu jenis evaluasi yang dilakukan pada akhir program atau proyek dengan tujuan mengevaluasi efektivitas keseluruhan. Fokus utama evaluasi sumatif adalah untuk menentukan apakah suatu program atau proyek mencapai tujuannya. Evaluasi sumatif sering kali digunakan untuk mengambil keputusan mengenai pengembangan suatu program atau proyek di masa depan atau untuk menentukan apakah suatu program atau proyek tertentu harus terus didanai.

3) Evaluasi Proses

Menentukan apakah kegiatan program dilaksanakan sebagaimana dimaksud. Evaluasi ini mengevaluasi proses pelaksanaan program. Fokusnya adalah pada pemahaman kegiatan dan metode yang digunakan dalam program dan bagaimana melaksanakannya.

4) Evaluasi Hasil

Mengukur dampak suatu program terhadap populasi sasaran dengan mengevaluasi kemajuan terhadap hasil atau hasil sasaran yang ingin dicapai oleh program. Fokusnya adalah pada dampak program terhadap peserta dan masyarakat luas.

5) Evaluasi Dampak

Memberikan informasi tentang dampak yang dihasilkan oleh suatu intervensi. Evaluasi dampak menilai efektivitas program dalam mencapai tujuan akhirnya. Evaluasi dampak mengevaluasi dampak jangka panjang program dan mengukur perubahan yang dapat dikaitkan dengannya. Evaluasi dampak harus menetapkan penyebab perubahan yang diamati

6) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja individu atau tim yang berpartisipasi dalam program dan mengevaluasi kemampuan mereka untuk

melakukan tugas tertentu. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk mengevaluasi keberhasilan suatu proyek, program, atau inisiatif dengan mengumpulkan bukti dan menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek. Tinjauan kinerja juga membantu perusahaan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membantu mengambil keputusan tentang alokasi sumber daya terbaik.

7) Analisis Biaya – Manfaat

Mengevaluasi aspek finansial program dan menentukan apakah manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Analisis biaya-manfaat menjumlahkan potensi imbalan yang diharapkan dari suatu situasi atau tindakan, lalu mengurangi total biaya yang terkait dengan tindakan tersebut.

6. Definisi Program DEA

Digital Entrepreneurship Academy yang seringkali disebut dengan DEA adalah program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertujuan menyiapkan Sumber Daya Manusia unggul untuk mempercepat transformasi digital bidang kewirausahaan. Program Digital Entrepreneurship Academy (DEA) ini sendiri sejatinya merupakan beasiswa pelatihan dari Kementerian Kominfo yang ditujukan untuk masyarakat umum calon pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pelaku usaha UMKM yang ingin naik kelas dalam hal pemanfaatan teknologi digital untuk dapat meningkatkan usahanya. Pelatihan ini memiliki tujuan utama berupa peningkatan keterampilan digital mulai dari dasar hingga menengah bagi calon pelaku usaha UMKM dan pelaku usaha UMKM. Akademi ini menargetkan peserta dari masyarakat umum yang ingin memulai usaha, maupun pelaku UMKM, guna mendukung percepatan transformasi digital Indonesia. Pelatihan DEA ini dilaksanakan selama dua hari.

Pelatihan Digital Entrepreneurship Academy memiliki empat tema dalam setiap

pelaksanaan pelatihan, yaitu adalah Kewirausahaan Digital Dasar (Dasar 1), Pemasaran Digital Dasar (Dasar 2), Madya 1 dan Madya 2. Dari setiap tema memiliki materi yang berbeda – beda. Digital Entrepreneurship Academy bergabung di dalam web atau aplikasi bernama Digital Talent Scholarship yang dimana disana tidak hanya tersedia pelatihan DEA, namun tersedia beberapa pelatihan lainnya sesuai kebutuhan masing – masing.

Pelatihan ini tidak dipungut biaya apapun karena bersifat gratis. Adapun persyaratan sebelum mengikuti pelatihan tersebut adalah mendaftarkan diri dahulu melalui web, namun sebelum itu peserta harus memiliki akun Digital Talent Scholarship (DTS) dan menginstall aplikasinya.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif dan biasanya menggunakan analisis. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna dan perspektif proses dan tema. Dalam penelitian kualitatif, landasan teori berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti sehingga proses penelitian lebih fokus dan konsisten dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Basri (2014) bahwa yang menjadi fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. (Harapan & Pendidikan, 2024)

Menurut Sugiono (2005), penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami mengenai fenomena – fenomena sosial dari perspektif pada partisipannya. Sederhananya, penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti suatu kondisi maupun situasi dari objek penelitian.

Alasan pemilihan penelitian dengan metode ini adalah peneliti ingin mengetahui

dan mendeskripsikan bagaimana hasil dari evaluasi pelaksanaan program pelatihan Digital Entrepreneurship Academy untuk UMKM di BPSDMP Kominfo Surabaya sehingga peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan dan mencari informasi terkait dengan objek tersebut.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian terdiri dari serangkaian pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif bersifat abstrak dan dapat berbeda – beda tergantung konteksnya. Tujuan dimasukkannya fokus penelitian adalah agar peneliti dapat mengumpulkan data – data yang diperlukan dan menganalisisnya sesuai dengan tujuan penelitian dan variabelnya. Oleh karena itu, peneliti mencari informasi terkait objek mengenai penelitian Evaluasi Program Pelatihan *Digital Entrepreneurship Academy* (DEA) di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo) Surabaya Untuk UMKM.

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja pelaksanaan program DEA di BPSDMP Kominfo Surabaya, faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong dalam keberhasilan pelaksanaan program DEA, serta peningkatan apa yang telah terjadi pada masyarakat pelaku UMKM setelah mengikuti pelatihan DEA.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah area yang digunakan untuk mengeksplorasi suatu fenomena yang sedang diperhatikan oleh peneliti. Oleh karena itu, tempat yang dipilih oleh peneliti adalah Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika, yang terletak di Jalan Raya Ketajen, No. 36 Kecamatan Gedangan, Sidoarjo - Jawa Timur. Lokasi ini juga berfungsi sebagai sumber informasi dari

para informan bagi peneliti. Pemilihan tempat ini didasarkan pada penemuan fenomena yang relevan untuk diteliti lebih mendalam, sehingga pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Evaluasi Program Pelatihan DEA Untuk UMKM Di BPSDMP Kominfo Surabaya

Peneliti menyajikan data penelitian ini menggunakan teori William N. Dunn melalui 6 variabel untuk membahas dan menyajikan data yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi yang ditentukan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Berdasarkan keefektifitasan program pelatihan DEA untuk UMKM di BPSDMP Kominfo Surabaya bahwa pelatihan sangat membantu peserta yang baru akan memulai dan yang sudah memulai usaha UMKM dengan pengetahuan pemahaman dari metode pembelajaran yang diberikan serta modul yang mudah dipahami oleh peserta agar peserta dapat menerapkannya pada usahanya masing – masing. Walaupun pelatihan dilakukan secara online, akan tetapi peserta masih dapat memahami materi ketika pelatihan sedang berlangsung.

2. Efisiensi

Tingkat efisien bahwa waktu yang digunakan untuk pelaksanaan pelatihan DEA sudah sangat cukup apabila untuk menghasilkan peningkatan literasi digitalisasi UMKM. Untuk pengenalan dasar waktu yang digunakan cukup efisien. Namun menurut pendapat peserta bahwa materi yang diberikan lebih banyak daripada praktik dan menyampaikan secara terburu – buru. Untuk peserta yang sudah memahami digital mungkin waktu yang digunakan akan lebih efisien dalam memahami materi.

3. Kecukupan

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa kecukupan yang diberikan oleh BPSDMP Kominfo Surabaya untuk pelatihan DEA sudah dikatakan cukup karena pelatihan ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan pelaku usaha UMKM yang sedang atau akan mengembangkan usahanya. Serta praktik yang diberikan juga dapat diterapkan dalam tahapan – tahapan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

4. Perataan

Dari segi pelaksanaan pelatihan DEA dalam pemerataan pada wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa tim pelaksana dengan sigap dan akan mendampingi apabila peserta mengalami kendala serta tim pelaksana akan memberikan solusi kepada peserta yang memiliki permasalahan pada akses ataupun kendala lainnya. Hal ini telah dirasakan oleh peserta secara merata agar pelatihan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target pencapaian.

5. Responsivitas

Tim pelaksana menyediakan link form untuk peserta memberikan keluhan atau saran selama pelatihan berlangsung guna untuk tim pelaksana mengevaluasi bagaimana selama pelaksanaan pelatihan berlangsung. Tim pelaksana juga merekam pelatihan DEA apabila dilaksanakan secara online yang berguna untuk mengantisipasi akan kendala koneksi yang dimiliki peserta ketika pelatihan berlangsung. Respon dari tim pelaksana dinilai baik oleh peserta mengenai ketanggapan respon nya dengan sigap

6. Ketepatan

Pelatihan DEA cukup tepat dalam pemberian materi yang relevan dari tahun ke tahun untuk meningkatkan pemasaran menggunakan teknologi saat ini. Pelatihan DEA di BPSDMP Kominfo Surabaya akan memberikan tambahan modul mengenai AI karena perubahan teknologi digital saat

ini sedang hangat – hangatnya menggunakan AI. Oleh karena itu, ketepatan dalam pelaksanaan pelatihan DEA ini adalah merujuk kepada peserta dengan diajarkan teknologi masa kini yaitu AI.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kawasan Wisata Budaya Kota Lama di Surabaya

Program Digital Entrepreneurship Academy (DEA) memiliki sejumlah faktor pendukung yang berperan dalam keberhasilannya dalam meningkatkan kemampuan digital para pelaku UMKM. Salah satu faktor utama adalah efisiensi program, di mana pelatihan ini berhasil memperluas wawasan peserta mengenai strategi pemasaran digital serta manajemen bisnis yang berbasis teknologi. Hal tersebut terbukti dengan jumlah peserta yang sering kali melebihi target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Selain itu, kemudahan akses pelatihan juga menjadi nilai tambah, karena format belajar secara daring memungkinkan peserta dari berbagai wilayah untuk mengikuti program tanpa harus hadir secara langsung, sehingga memudahkan mereka dalam mendapatkan ilmu baru.

Bahwa faktor keberhasilan dalam pelatihan DEA adalah dengan mengadakan pelatihan secara gratis serta peserta mendapatkan materi – materi yang update sesuai dengan teknologi di era saat ini untuk mengembangkan usaha mereka menggunakan teknologi AI yang akan diajarkan oleh instruktur yang murni sebagai pelaku usaha. Selain itu, kerja sama antar tim juga mempengaruhi keberhasilan pelatihan tersebut dengan niat dan komitmen yang diberikan oleh tim. Peserta yang berminat untuk mengikuti pelatihan DEA juga sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pelatihan DEA.

Meskipun mempunyai banyak keuntungan, pelaksanaan program DEA masih menghadapi beberapa masalah yang perlu diatasi agar efektivitasnya dapat meningkat.

Salah satu rintangan utama adalah kurangnya akses internet, terutama untuk peserta yang berasal dari daerah terpencil. Keterbatasan dalam infrastruktur komunikasi mengakibatkan beberapa peserta menemui kesulitan dalam mengikuti pelatihan online dengan baik. Di samping itu, perbedaan dalam tingkat literasi digital di kalangan UMKM juga menjadi tantangan, karena tidak semua peserta memiliki pemahaman teknologi yang setara, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dalam penyampaian materi.

Keterbatasan lain yang dihadapi adalah kurangnya infrastruktur digital di beberapa UMKM, baik dalam hal perangkat teknologi maupun penggunaan platform digital untuk manajemen bisnis. Tanpa adanya dukungan perangkat yang memadai, penerapan ilmu yang didapat dari pelatihan menjadi kurang efektif. Selain itu, masih terdapat ketidakmerataan dalam partisipasi, di mana informasi mengenai program ini belum sepenuhnya menjangkau seluruh UMKM yang berpotensi mendapat manfaat dari pelatihan. Banyak pelaku usaha yang kurang mendapatkan informasi atau memiliki waktu yang terbatas sering kali tidak dapat berpartisipasi dalam pelatihan, sehingga kemampuan program ini untuk memberdayakan UMKM secara menyeluruh masih belum optimal.

Bahwa faktor penghambat yang dialami dalam pelatihan DEA ini adalah literasi masyarakat yang rendah dan tidak memiliki handphone atau jaringan yang memadai serta sulitnya mencari peserta untuk mengikuti pelatihan DEA untuk mencapai target dengan meyakinkan peserta tersebut. Kemudian kendala teknis di dalam digitalent dan LMS yang sering error juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Program Digital Entrepreneurship Academy (DEA) telah terbukti sangat efektif dalam memperbaiki kemampuan digital UMKM di Surabaya. Ini dibuktikan dengan

hasil yang sering kali melebihi target yang ditetapkan, serta peningkatan pemahaman peserta mengenai pemasaran digital dan strategi bisnis berbasis teknologi. Selain itu, penyelenggaraan program secara online telah meningkatkan efisiensi dalam menjangkau peserta dari berbagai daerah. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan teknis, seperti akses internet yang tidak merata dan kurangnya perangkat digital di kalangan peserta, yang mempengaruhi kelancaran pelatihan. Dalam segi kecukupan bahwa materi pelatihan DEA telah mencakup aspek fundamental digitalisasi UMKM, namun waktu pelatihan yang diberikan juga menjadi tantangan dalam pemahaman mendalam, terutama bagi peserta yang baru mengenal teknologi digital. Secara merata peserta juga akan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan apabila memiliki kendala dalam pelaksanaan pelatihan ketika sedang berlangsung, kemudian respon yang diberikan oleh tim pelaksana cukup membantu peserta dengan sigap. Meskipun materi pelatihan dan metode pembelajaran sudah relevan dengan kebutuhan digitalisasi UMKM, diperlukan segmentasi berdasarkan literasi digital dan jenis usaha agar lebih tepat sasaran sesuai dengan bidang masing – masing.

2. Rekomendasi

Tidak dapat dipungkiri dalam keberhasilan suatu pelaksanaan program pelatihan DEA, terdapat kekurangan atau beberapa hal yang perlu dibenahi. Peneliti menyampaikan beberapa saran untuk pelatihan Digital Entrepreneurship Academy (DEA) di BPSDMP Kominfo Surabaya sebagai berikut :

A. Bagi BPSDMP Kominfo Surabaya

- 1) Dengan mengembangkan sistem pembelajaran hybrid untuk menjangkau pelaku usaha UMKM yang memiliki keterbatasan internet dan ketidaksetaraan gadget

- 2) Menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah atau komunitas lokal untuk menyediakan fasilitas internet gratis bagi peserta di daerah terpencil

B. Bagi Instruktur Pelatihan Digital Entrepreneurship Academy (DEA)

- 1) Mengelompokkan peserta ke dalam beberapa kategori (pemula, menengah, lanjutan) sesuai dengan tingkat pemahaman digital mereka agar bahan ajar menjadi lebih relevan dengan kemampuan yang dimiliki.
- 2) Menyediakan lebih banyak sesi praktik yang intensif agar peserta bisa langsung menerapkan pengetahuan yang didapat dalam usaha mereka serta menyampaikan materi tidak terlalu terburu – buru

C. Bagi tim pelaksana

- 1) Mengembangkan mekanisme evaluasi yang lebih sistematis untuk menilai dampak pelatihan terhadap perkembangan bisnis peserta.
- 2) Menggunakan data hasil evaluasi untuk terus menyesuaikan materi dan metode pelatihan agar lebih relevan dengan kebutuhan UMKM yang terus berkembang.

D. Bagi peserta

- 1) Pastikan memiliki pengetahuan dasar mengenai teknologi digital dan pemasaran online agar lebih mudah memahami materi yang disampaikan
- 2) Menggunakan perangkat yang memadai, seperti laptop atau handphone dengan spesifikasi yang cukup untuk mengikuti pelatihan secara online.
- 3) Memiliki koneksi internet yang stabil agar tidak mengalami gangguan selama sesi pelatihan berlangsung
- 4) Persyaratan pendaftaran telah dipenuhi, seperti memiliki akun email aktif dan dokumen yang diperlukan (KTP atau KK).

REFERENSI

- Akbar, M. F., Rudianto, N. A. R., & Yandi, W. (2023). Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Digital Entrepreneurship Academy. *GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 1061–1071. <https://doi.org/10.31571/gervasi.v7i3.4460>
- Aryuniasari, Rakib, M., Ahmad, M. I. S., & Mustari. (2023). Analisis Pengembangan UMKM Melalui Digital Entrepreneurship dengan Model Triplehelix pada Pasar Hanggar Talasalapang di Kota Makassar. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 4(1), 489–502. <https://doi.org/10.26858/je3s.v4i1.223>
- Bulow, I. D., Baali, Y., Rame, T., & Fernando, H. (2022). Pelaksanaan Program DEA Oleh BPSDMP Kominfo untuk Meningkatkan UMKM di Kota Manado. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 11379–11386.
- Dewi, D. S. K. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. UM Jakarta Press, 268.
- Eka, F., Rahmad, N., & Sunarya, A. (2023). Evaluasi Penggunaan Aplikasi E-Sambat di Kota Pasuruan Fendi Eka Nur Rahmad, Aris Sunarya SMIA – Edisi Khusus Pelayanan Publik (2) Tahun 2023. 2, 725–732.
- Fika, N., Fauzi, A., & Qurtubi, A. (2023). Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern. 05(04), 16737–16747.
- Harapan, P. K., & Pendidikan, S. (2024). Evaluasi Program Keluarga Harapan Pada Sektor Pendidikan (Studi Pada Sekolah SMPN 1 Adonara) Rohmania Mustarif, Ika Devy Pramudiana, Eny Haryati SAP – Vol. 2 No. 2 Tahun 2024. 2(2), 351–364.
- Ii, B. A. B. (n.d.). No Title. 11–30.
- Ii, B. A. B., & Teori, A. D. (1994). No Title. 12–47.
- Iii, B. A. B., Jenis, A., & Penelitian, P. (2019). Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 68 1 30. 30–34.
- Kebijakan, A. E. (2008). No Title.
- Mendrofa, R., Pembinaan, U., Indonesia, M., Publik, K., & Administrasi, T. (2024). Implementasi Kebijakan Publik serta Terhadap Kepentingan Publik Berdasarkan Teori Administrasi Negara Saat Ini. *Journal Genta Mulia*, 15(1), 387–392.
- Politik, S., & Brawijaya, U. (2016). KONSEP DAN KAJIAN TEORI PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK Sholih Muadi Ismail MH Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Ahmad Sofwani. 06, 195–224.
- Rhamadona, S., Sufa, S., Indrasari, M., Brumadyadisty, G., & Asnawi, A. (2023). Communication Audit of Digital Entrepreneurship Academy of Human Resources Research Program and Development Agency of the BPSDMP Kominfo Surabaya in Pamekasan Region. *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 197–206. <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i01.422>
- Seanbau, F. N., Sunarya, A., & Sholichah, N. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Program Surabaya Single Window di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Fransiska Nancy Seanbau, Aris Sunarya, Nihayatus Sholichah SAP – Vol. 2 No. 1 Tahun 2024. 2(1), 105–1